

## **IMPLEMENTASI PROGRAM PARKIR BERLANGGANAN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**

**Heris Hendrayana Pratama**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya  
[heris.19073@mhs.unesa.ac.id](mailto:heris.19073@mhs.unesa.ac.id)

**Suci Megawati**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya  
[sucimegawati@unesa.ac.id](mailto:sucimegawati@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Implementasi program parkir berlangganan adalah proses penerapan dan pelaksanaan peraturan yang mengatur sistem parkir di suatu daerah, di mana pengguna parkir membayar retribusi secara berkala (misalnya tahunan) untuk mendapatkan izin parkir di lokasi-lokasi yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan parkir berlangganan di Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif. Penelitian ini berfokus pada "Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan" yang objek utamanya adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dan sebagian Juru Parkir yang telah melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan program parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dapat dikatakan berhasil dalam beberapa aspek berdasarkan faktor ukuran (satuan) dan tujuan kebijakan, faktor sumber daya, faktor komunikasi dan aktivitas pelaksana, faktor karakteristik agen pelaksana, faktor kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta faktor sikap pelaksana. Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi untuk memastikan kesuksesan jangka panjang kebijakan ini. Tantangan utama meliputi peningkatan teknologi informasi yang digunakan untuk registrasi dan pembayaran, karena masih terdapat kendala teknis yang menghambat kelancaran layanan.

**Kata Kunci:** Program, Parkir Berlangganan, Dinas Perhubungan

### **Abstract**

Implementation of a subscription parking program is the process of implementing and enforcing regulations governing the parking system in an area, where parking users pay a fee periodically (for example annually) to obtain a parking permit at designated locations. This study aims to determine and analyze the implementation of the subscription parking policy at the Department of Transportation (DISHUB) of Bangkalan Regency. This research uses qualitative methods with a descriptive nature. This research will focus on "Implementation of Subscription Parking Policy at the Bangkalan Regency Transportation Service" whose main object is the Bangkalan Regency Transportation Service and some parking attendants who have collaborated with the Bangkalan Regency Transportation Service. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. Data analysis in this study uses data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of the subscription parking program policy at the Bangkalan Regency Transportation Service can be said to be successful in several aspects based on size factors (units) and policy objectives, resource factors, communication factors and implementing activities, characteristics of implementing agents, social and economic condition factors. and politics, as well as implementing attitude factors. However, there are several challenges that still need to be overcome to ensure the long-term success of this policy. The main challenges include improving the information technology used for registration and payments, because there are still technical obstacles that hinder the smooth running of services.

**Keywords:** Program, Subscription Parking, Transportation Service

### **PENDAHULUAN**

Sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari dalam wilayah seseorang yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber

pendanaan bagi setiap daerah di Indonesia, yang dananya berasal dari hasil pajak daerah, pembayaran daerah dan potensi kekayaan daerah. Dimana kondisi tersebut seharusnya dapat diatasi langsung oleh pemerintah daerah

sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab. Pemerintah Daerah mempunyai tugas salah satunya memberikan pelayanan kepada masyarakat (Kumala Oktisari & Khoirun Nisak, 2023).

Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan peran pelayanan dengan cakupan bidang perparkiran, menata lingkungan, menata arus lalu lintas yang tertib dan lancar, serta mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Marwiyah Siti et al., 2024). Pemberlakuan retribusi parkir berlangganan adalah salah satu contoh kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ferisiansyah & Megawati, 2022). Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada proses perumusannya, tetapi juga pada pelaksanaannya. Kebijakan publik dibuat untuk menangani masalah agar lebih tertata, memperlancar kenyamanan dan keamanan publik, dan mempengaruhi cara bertindak masyarakat (Faj'jrina & Wibawani, 2024).

Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini memberikan berbagai manfaat, salah satunya adalah mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah tabel pendapatan parkir tahun 2023.

Tabel 1. Pendapatan Parkir Retribusi Parkir Berlangganan Tahun 2023

No	Bulan	Pendapatan dari Retribusi Tahun 2023
1	Januari	Rp. 427.915.000
2	Februari	Rp. 350.220.000
3	Maret	Rp. 407.115.000
4	April	Rp. 317.000.000
5	Mei	Rp. 475.010.000
6	Juni	Rp. 413.285.000
7	Juli	Rp. 468.010.000
8	Agustus	Rp. 442.115.000
9	September	Rp. 404.905.000
10	Oktober	Rp. 458.465.000
11	November	Rp. 431.130.000
12	Desember I	Rp. 267.470.000
13	Desember II	Rp. 175.645.000
14	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 5.038.285.000</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan tabel pendapatan dari retribusi parkir berlangganan tahun 2023, tercatat total pendapatan sebesar Rp. 5.038.285.000 yang diperoleh dari Januari hingga

Desember, dengan rincian dua periode untuk bulan Desember. Pendapatan tertinggi terjadi pada bulan Mei, yaitu Rp. 475.010.000, sementara pendapatan terendah tercatat pada Desember II sebesar Rp. 175.645.000. Secara keseluruhan, pendapatan ini baru terealisasi sebesar 90% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sebesar 10%, atau setara dengan Rp. 559.809.000, untuk mencapai realisasi pendapatan 100%. Hal tersebut terjadi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ini, parkir liar yang masih terjadi, serta pengawasan dan pengelolaan yang belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya upaya optimalisasi dalam pengelolaan parkir berlangganan.

Namun, penerapan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan hingga saat ini masih belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari keluhan masyarakat yang merasa dirugikan. Di lapangan, masyarakat masih harus membayar biaya parkir tambahan. Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Bangkalan juga mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum maksimal, mengingat kebijakan tersebut baru diterapkan pada pertengahan tahun 2021 dan masih belum sepenuhnya terselesaikan.

Menanggapi keluhan tersebut, beberapa anggota Komisi A bahkan mendesak agar kebijakan parkir berlangganan ini dihapus. Hal ini disebabkan oleh rendahnya aspek keadilan dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, masyarakat kerap memberikan uang kepada juru parkir karena rasa iba, meskipun tugas tersebut merupakan kewajiban juru parkir. Sementara itu, Dinas Perhubungan telah mengeluarkan kebijakan yang melarang petugas parkir untuk memungut atau meminta uang dari masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, (2019) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dan deskriptif. Penelitian ini menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks alami melalui berbagai metode yang bersifat alamiah.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan untuk penelitian lapangan berada di daerah pecinan dan sekitar jalan KH Mohammad Kholil Bangkalan menjadi kawasan yang dilewati sehari-hari untuk parkir berlangganan, dikarenakan lokasi merupakan pusat keramaian.

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari proses implementasi kebijakan parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten

Bangkalan. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup informasi tentang pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan, serta data lainnya yang mendukung tindakan yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pegawai di Dinas Perhubungan untuk memohon izin penelitian, serta dengan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas parkir berlangganan dan juru parkir untuk menggali informasi terkait implementasi kebijakan tersebut. Metode dokumentasi mengumpulkan data dengan mengumpulkan informasi tertulis tentang peraturan peraturan parkir berlangganan, tindakan pihak yang bersangkutan sebelumnya, dan situasi praktik di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yaitu mencakup tahap berikut:

#### 1. Tahap Reduksi Data (*Data Reduction*)

Fokus pada hal-hal yang utama dan penting, mencari tema utama dan pola yang muncul, dengan menghapuskan hal-hal yang tidak relevan.

#### 2. Tahap Penyajian Data (*Data Display*)

Peneliti menyusun data dalam bentuk uraian singkat. Peneliti juga mengidentifikasi hubungan antara kategori-kategori yang relevan.

#### 3. *Verifiation (Conclusion Drawing)*

Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan kualitatif yang diinginkan merupakan inovasi yang dapat memberikan gambaran deskriptif tentang pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pelaksanaan kebijakan program parkir berlangganan di Dinas Perhubungan dirancang untuk mencapai keberhasilan dengan memperhatikan berbagai faktor kunci yang saling berkaitan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur, program ini diharapkan bisa terlaksana efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan faktor-faktor berikut.

#### 1. Berdasarkan Faktor Ukuran (Standar) Dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan menunjukkan adanya usaha yang terstruktur dan terintegrasi dalam mencapai tujuan kebijakan. Penerapan kebijakan ini mencakup langkah-langkah teknis seperti registrasi pengguna melalui aplikasi resmi

DISHUB, pemberian kartu parkir, penetapan zona parkir khusus, serta pemasangan rambu dan tanda yang jelas di area parkir.

Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan, persentase pencapaian dijadikan indikator utama yang menunjukkan sejauh mana tujuan kebijakan tersebut telah tercapai.

Tabel 2. Persentase Pencapaian Parkir Berlangganan Dinas Perhubungan Tahun 2023

Bulan	Persentase
Januari	8.32
Februari	6.81
Maret	7.91
April	6.16
Mei	9.23
Juni	8.03
Juli	9.10
Agustus	8.59
September	7.87
Oktober	8.91
November	8.38
Desember	8.61
<b>Jumlah</b>	<b>97.92</b>

Sumber: Dinas Perhubungan

Tabel diatas menunjukkan persentase kebijakan parkir berlangganan yang disajikan menunjukkan perkembangan pencapaian realisasi kebijakan dari bulan Januari hingga Desember. Persentase yang tertera mencerminkan sejauh mana target kebijakan tersebut telah direalisasikan setiap bulannya. Pada bulan Januari, realisasi kebijakan parkir mencapai 8,32%, dan terjadi fluktuasi sepanjang tahun, dengan persentase tertinggi sebesar 9,23% di bulan Mei dan terendah sebesar 6,16% di bulan April. Secara umum, angka-angka ini menunjukkan bahwa pencapaian kebijakan terus mengalami naik turun, dengan rata-rata berada di kisaran 7-9% setiap bulannya. Jika diakumulasikan, total persentase pencapaian selama setahun adalah 97,92%. Angka ini memberikan gambaran bahwa secara keseluruhan, kebijakan parkir berlangganan hampir mencapai target 100% dalam setahun, dengan beberapa bulan menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dari bulan lainnya.

Tabel 3. Persentase Pencapaian Parkir Berlangganan Dinas Perhubungan Tahun 2024

Bulan	Persentase
Januari	7.20
Februari	6.20
Maret	6.86

Bulan	Persentase
April	6.88
Mei	7.65
Juni	7.41
Juli	9.39
Agustus	8.59
<b>Jumlah</b>	<b>60.18</b>

Sumber: Dinas Perhubungan

Tabel di atas menunjukkan persentase realisasi target bulanan dari bulan Januari hingga Agustus. Persentase yang di atas menggambarkan sejauh mana target yang telah ditetapkan berhasil direalisasikan setiap bulannya. Pada bulan Januari, realisasi target mencapai 7,20%, dan terjadi fluktuasi sepanjang tahun dengan persentase tertinggi sebesar 9,39% di bulan Juli dan terendah sebesar 6,20% di bulan Februari. Secara umum, angka-angka ini menunjukkan bahwa pencapaian target mengalami naik turun, dengan rata-rata berada di kisaran 6-9% setiap bulannya. Jika diakumulasikan, total persentase pencapaian selama delapan bulan pertama adalah 60,18%. Angka ini memberikan gambaran bahwa pencapaian target terus bergerak dinamis, dengan beberapa bulan menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dari bulan lainnya.

“Penerapan teknisnya meliputi registrasi pengguna parkir berlangganan melalui aplikasi yang disediakan DISHUB. Kami juga menyediakan kartu parkir berlangganan yang harus ditempelkan di kendaraan. Selain itu, kami meningkatkan pengawasan dengan petugas lapangan yang melakukan pengecekan berkala. Kami juga berkolaborasi dengan pihak keamanan untuk memastikan area parkir aman dan tertib”. (Informan : Kusuma Dwijaya sebagai Kepala DISHUB)

Di lain sisi, Agung Dwiyanto sebagai Anggota DISHUB menyampaikan :

“Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola parkir yang lebih efektif dan efisien, memenuhi standar pelayanan publik yang tinggi, mendukung pengembangan ekonomi lokal, dan mengurangi parkir liar yang menyebabkan kemacetan”. (Informasi: Agung Dwiyanto sebagai Anggota DISHUB)

## 2. Berdasarkan Faktor Sumber Daya

Implementasi program parkir berlangganan di Dinas Perhubungan memerlukan sejumlah sumber daya

yang esensial untuk memastikan kelancaran dan keberhasilannya.

“Sumber daya yang dibutuhkan antara lain perangkat teknologi seperti sistem aplikasi untuk registrasi dan pembayaran, infrastruktur fisik seperti rambu dan tanda khusus, serta petugas lapangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan. Selain itu, kami juga memerlukan dukungan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas”. (Informasi: Agung Dwiyanto sebagai Anggota DISHUB)

“Kami sebagai juru parkir merasakan beberapa masalah yang timbul setelah program parkir berlangganan diterapkan. Salah satunya adalah adanya peningkatan dalam hal penegakan aturan parkir yang kadang-kadang menimbulkan ketegangan dengan pengguna parkir. Selain itu, ada juga tantangan dalam mengelola tempat parkir yang semakin padat di zona-zona tertentu. Kami berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, namun perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara kami dengan pihak terkait untuk meminimalisir masalah yang timbul”. (Informan: Jaya Permata sebagai Juru Parkir).

## 3. Berdasarkan Faktor Komunikasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan, berbagai pihak terkait, termasuk para ahli dan praktisi diundang sebagai narasumber dalam diskusi dan seminar yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan.

“Komunikasi merupakan kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan parkir berlangganan. Kami melaksanakan berbagai kegiatan komunikasi seperti pertemuan koordinasi internal, sosialisasi langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta kampanye melalui media sosial dan website resmi. Kami juga menyediakan nomor layanan pelanggan dan email untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan dan mendapatkan informasi terkini mengenai kebijakan yang sedang diterapkan”. (Informan : Kusuma Dwijaya sebagai Kepala DISHUB).

## 4. Berdasarkan Faktor Karakteristik Agen Pelaksana

Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan menonjol dengan karakteristik yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Mereka dikenal memiliki integritas yang tinggi, keterampilan teknis yang handal, dan kemampuan untuk bekerja secara tim.

“Pegawai kami di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dituntut untuk memiliki integritas tinggi, keterampilan teknis yang memadai, dan kemampuan untuk bekerja secara tim. Mereka adalah individu yang proaktif, fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi, dan mampu mengambil keputusan dengan bijaksana”. (Informasi: Agung Dwiyanto sebagai Anggota DISHUB).

##### **5. Berdasarkan Faktor Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Penerapan kebijakan parkir berlangganan di Kota Bangkalan memunculkan berbagai dinamika dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Secara sosial, tingkat kesadaran terhadap pentingnya kedisiplinan dalam parkir serta ketersediaan fasilitas parkir yang memadai mempengaruhi penerimaan terhadap kebijakan ini. Politik lokal juga memainkan peran penting dengan dukungan dari sejumlah kelompok masyarakat dan mungkin adanya opini yang skeptis terhadap kebijakan baru ini.

“Kondisi sosial masyarakat Kota Bangkalan pada saat implementasi kebijakan parkir berlangganan ini mencerminkan tingkat kesadaran yang berbeda terhadap aturan baru tentang parkir. Politik lokal juga mempengaruhi penerimaan terhadap kebijakan ini, dengan dukungan dari beberapa kelompok dan mungkin juga ada opini yang skeptis. Secara ekonomi, kebijakan ini memiliki dampak langsung terhadap biaya transportasi harian bagi pengguna parkir dan juga dapat mempengaruhi pelaku usaha di sekitar zona parkir berlangganan”. (Informan : Kusuma Dwijaya sebagai Kepala DISHUB).

##### **6. Berdasarkan Konteks Sikap Pelaksana**

Sikap para pelaksana dari Dinas Perhubungan terhadap kebijakan parkir berlangganan menunjukkan respons yang beragam namun secara umum positif. Para pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menyediakan pelayanan yang lebih terstruktur dan efisien kepada masyarakat melalui implementasi kebijakan ini.

“Sebagai pelaksana di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, kami menyambut

baik kebijakan parkir berlangganan ini. Kami percaya bahwa kebijakan ini akan membantu mengatasi masalah parkir yang selama ini menjadi tantangan, serta meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap ruang parkir secara lebih terstruktur”. (Informasi: Agung Dwiyanto sebagai Anggota DISHUB).

“Saya mendukung implementasi kebijakan parkir berlangganan ini meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Kebijakan ini membantu meningkatkan profesionalisme kami dalam mengatur parkir dan memberikan kepastian dalam pekerjaan kami sehari-hari. Kami berkomitmen untuk bekerja sesuai aturan yang ditetapkan, meskipun kami juga berharap adanya dukungan dan pemahaman lebih lanjut dari masyarakat terkait dengan perubahan ini”. (Informan : Kusuma Dwijaya sebagai Kepala DISHUB).

#### **Pembahasan**

Keberhasilan kebijakan tidak cuma ditentukan oleh proses pembuatannya, tetapi juga oleh implementasinya. Analisis kebijakan publik diperlukan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam tataran politik guna menyelesaikan masalah-masalah kebijakan, memanfaatkan teori, metode, dan teknik dari berbagai bidang ilmu untuk pemecahan masalah yang lebih komprehensif dan efektif (Faj'rina & Wibawani, 2024).

Dari hasil penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya, jadi bisa dianalisis kalau terdapat 6 faktor kebijakan program parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sebagai berikut.

##### **1. Faktor Ukuran (Standar) dan Tujuan Kebijakan**

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat dinilai berdasarkan pencapaian tujuan kebijakan yang dirancang secara realistis dan selaras dengan kondisi sosial budaya. Jika ukuran dan sasaran kebijakan yang diterapkan terlalu idealis atau utopis, maka realisasinya akan menjadi sulit dicapai (Kurniawan & Maani, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisis bahwa implementasi kebijakan ini telah melibatkan langkah-langkah teknis yang terstruktur dan terintegrasi. Langkah-langkah tersebut mencakup registrasi pengguna melalui aplikasi DISHUB, penerbitan kartu parkir, pengawasan rutin oleh petugas lapangan, dan kerjasama dengan pihak keamanan untuk menjaga ketertiban di area parkir. Selain itu, penetapan zona parkir berlangganan di lokasi strategis, sistem pendaftaran dan pembayaran online, serta pemasangan rambu dan tanda khusus,

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir dan meminimalisir praktik parkir liar.

Tujuan utama kebijakan ini mencakup upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir dengan mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan bagi pengguna jalan.

## 2. Faktor Sumber Daya

Salah satu syarat utama bagi kelangsungan suatu organisasi adalah kepemilikan sumber daya (resources). Dalam konteks pelaksanaan parkir berlangganan, keterbatasan sumber daya dapat mengakibatkan Undang-Undang tidak dapat diterapkan, layanan tidak tersedia, dan peraturan yang memadai tidak dapat dirumuskan (Fatimah & Rodiyah, 2018).

Menurut hasil penelitian yang sudah dilaksanakan pada aspek unsur sumber daya, maka ditemukan bahwa faktor tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Pertama, kondisi sumber daya yang tersedia tergolong baik tetapi harus menghadapi beberapa tantangan yang harus dibeskan. Teknologi informasi yang ada perlu ditingkatkan dalam hal keandalan dan integrasi sistemnya agar dapat mendukung proses registrasi dan pembayaran parkir secara efisien melalui aplikasi yang disediakan.

Kedua, jumlah dan keterampilan petugas lapangan masih menjadi perhatian utama. Meskipun sudah ada, penambahan dan pelatihan lebih lanjut diperlukan agar pengawasan terhadap pelanggaran parkir dapat dilakukan secara lebih efektif. Ketiga, kondisi nyata dari implementasi kebijakan parkir berlangganan masih dalam tahap pengembangan. Meskipun aplikasi sudah aktif digunakan, masih terdapat kendala teknis yang perlu segera diperbaiki untuk memastikan layanan yang lancar bagi pengguna parkir berlangganan.

Keempat, dari perspektif para juru parkir yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, kebijakan ini menimbulkan beberapa masalah yang perlu ditangani dengan lebih baik. Mereka mengalami peningkatan dalam penegakan aturan parkir yang kadang menimbulkan ketegangan dengan pengguna parkir.

## 3. Faktor Komunikasi dan Aktivitas Pelaksana

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan parkir sangat bergantung pada kerja sama dan komunikasi yang efektif, sehingga kebijakan tersebut dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, konsistensi dalam pelaksanaan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) menjadi hal yang krusial (Safitri et al., 2024).

Berdasarkan interview yang sudah dilaksanakan, maka bisa dianalisis kalau komunikasi yang efektif antara internal dinas dan eksternal dengan masyarakat serta pihak terkait menjadi fondasi utama untuk memastikan

pemahaman yang jelas dan penerimaan yang luas terhadap kebijakan parkir berlangganan. Sosialisasi aktif dilakukan melalui berbagai kanal seperti brosur, seminar, media sosial, dan website resmi, yang bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap manfaat kebijakan ini serta mengumpulkan masukan yang kritis dari berbagai pihak.

## 4. Faktor Karakteristik Agen Pelaksana

Salah satu unsur yang mempengaruhi kompetensi dan ukuran agen pelaksana adalah karakteristik lembaga/organisasi pelaksana. Ini mencakup dukungan legislatif dan eksekutif, tingkat kontrol hierarkis atas unit pelaksanaan terbawah selama implementasi, dan hubungan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan. (Witjaksono & Wibawani, 2023).

Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan terbukti memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang transportasi dan perhubungan, serta kemampuan adaptasi yang cepat terhadap perubahan dan tantangan operasional. Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan juga terlibat langsung dalam penegakan aturan parkir secara adil dan transparan. Kemampuan untuk memberikan solusi yang efektif terhadap berbagai permasalahan yang mungkin timbul, seperti peningkatan biaya parkir dan manajemen tempat parkir yang padat.

Pegawai Dinas Perhubungan berperan penting dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan parkir berlangganan dan menciptakan sistem parkir yang lebih terstruktur dan aman bagi masyarakat.

## 5. Faktor Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana pengaruh lingkungan eksternal terhadap keberhasilan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan eksternal yang kondusif agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif. (Kurniawan & Maani, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, jadi bisa dianalisis bahwasanya secara sosial, masyarakat Kota Bangkalan menunjukkan tingkat kesadaran yang beragam terhadap aturan baru tentang parkir berlangganan. Tingkat kesadaran ini mempengaruhi tingkat penerimaan dan kepatuhan terhadap kebijakan parkir berlangganan, serta pentingnya fasilitas parkir yang memadai untuk mendukung implementasinya.

Secara ekonomi, kebijakan parkir berlangganan memiliki dampak langsung terhadap biaya transportasi harian bagi pengguna parkir. Kenaikan biaya parkir dapat mempengaruhi pengeluaran harian masyarakat, terutama mereka yang menggunakan parkir secara rutin. Politik lokal juga menjadi faktor penting dalam penerimaan

kebijakan ini. Pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat setempat.

#### **6. Konteks Sikap Pelaksana**

Dinas Perhubungan merupakan bagian dari pelaksana otonomi daerah di bidang transportasi yang terletak di bawah kewenangan Gubernur dan bertanggung jawab kepadanya. Fungsi utama Dinas Perhubungan adalah mengerjakan urusan pemerintahan daerah dalam sektor perhubungan dengan mengacu pada prinsip otonomi daerah serta tugas pembantuan (Iskandar, 2023). Sebuah pemerintahan akan menghadapi berbagai masalah kompleks dalam menjalankan tugas negara jika tidak diperkuat oleh keadaan keuangan yang memadai. (Mariani et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis terkait kebijakan parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, sikap para pelaksana terhadap kebijakan ini menunjukkan keselarasan dan komitmen yang kuat. Para pelaksana menyambut kebijakan parkir berlangganan dengan sikap positif, menganggapnya sebagai langkah strategis untuk meningkatkan disiplin parkir dan efisiensi pengelolaan ruang publik secara keseluruhan.

Hubungan antara wewenang Bapenda dan sikap pelaksana kebijakan sangat erat, terutama dalam hal efektivitas pelaksanaan kebijakan. Wewenang Bapenda mencakup pengaturan dan pengawasan pendapatan dari program parkir berlangganan. Namun, sikap pelaksana di lapangan, seperti petugas Dinas Perhubungan, sangat menentukan apakah kebijakan tersebut bisa terlaksana sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan.

Secara keseluruhan, kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan, penerapannya dapat dikatakan berhasil dalam beberapa aspek. Kebijakan ini telah melibatkan langkah-langkah teknis yang terstruktur seperti registrasi pengguna melalui aplikasi DISHUB, penerbitan kartu parkir, dan pengawasan rutin oleh petugas lapangan. Selain itu, penetapan zona parkir berlangganan di lokasi strategis, sistem pendaftaran dan pembayaran online, serta pemasangan rambu dan tanda khusus, menunjukkan upaya yang nyata dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diselesaikan untuk menjamin keberhasilan kebijakan ini dalam jangka panjang. Tantangan utama meliputi peningkatan teknologi informasi yang digunakan untuk registrasi dan pembayaran, karena masih terdapat kendala teknis yang menghambat kelancaran layanan. Selain itu, sosialisasi kebijakan kepada masyarakat perlu

ditingkatkan agar kesadaran dan penerimaan terhadap kebijakan ini dapat lebih merata.

#### **Ucapan Terima Kasih**

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya yang memungkinkan saya menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta, atas doa, cinta, dan dukungan tanpa henti yang menjadi sumber semangat dalam setiap langkah saya.
3. Ibu Dr. Suci Megawati, M. Si, selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan perhatian yang tulus selama proses penyusunan jurnal ini.
4. Bapak Akhmad Roniyun Hamid, ST., MM., selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan beserta jajaran, atas kerja sama dan keterbukaan dalam memberikan informasi serta data yang sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini.
5. Sahabat saya, Siti Aisyah, S. Pd., Gr., atas bantuan, dukungan, dan kerja samanya yang turut berkontribusi dalam kelancaran penyusunan jurnal ini.

#### **PENUTUP**

##### **Simpulan**

Menurut hasil analisis yang sudah dipaparkan, maka bisa ditarik kesimpulan kalau penerapan kebijakan program parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dapat dikatakan berhasil dalam beberapa aspek berdasarkan faktor ukuran (satuan) dan tujuan kebijakan, faktor sumber daya, faktor komunikasi dan aktivitas pelaksana, faktor karakteristik agen pelaksana, faktor kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta faktor sikap pelaksana. Kebijakan ini telah melibatkan langkah-langkah teknis yang terstruktur seperti registrasi pengguna melalui aplikasi DISHUB, penerbitan kartu parkir, dan pengawasan rutin oleh petugas lapangan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diselesaikan untuk menjamin keberhasilan kebijakan ini dalam jangka panjang. Tantangan utama meliputi peningkatan teknologi informasi yang digunakan untuk registrasi dan pembayaran, karena masih terdapat kendala teknis yang menghambat kelancaran layanan.

##### **Saran**

Karena masih adanya kendala yang menyebabkan penghambatan dalam Implementasi Layanan Program Parkir Berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan perlu adanya peningkatan teknologi untuk registrasi dan pembayaran. Sehingga Layanan tersebut dapat dilakukan secara maksimal serta memberikan

manfaat dan kemudahan untuk para tamu yang datang di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

Surabaya. *Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13840–13854.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faj'jrina, F. S. N., & Wibawani, S. (2024). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 182–189.
- Fatimah, S., & Rodiyah, I. (2018). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo). *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 6(2), 155–171. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3010>
- Ferisiansyah, T., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Program Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang. *Publika*, 9(5), 75–86. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n5.p75-86>
- Kumala Oktisari, M., & Khoirun Nisak. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pasar Besar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Madiun. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 3(1), 237–246. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i1.2112>
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67–78. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Mariani, M., Haskar, E., & Farda, N. F. (2023). Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir Dengan Kartu Brizzi Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020. *Otentik Law Journal*, 1(2), 192–205. <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/OLJ/article/view/4548%0Ahttps://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/OLJ/article/viewFile/4548/3234>
- Marwiyah Siti, D, K, U. N., & Pratama Alfiat. (2024). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2020). *Journal Of Social Science Research*, 4(4), 7739–7747.
- Moleong, L. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Safitri, L. A., Avisena, M. A., Tribuana, A. A., & Ramadhani, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Via QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya Dalam Rangka Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat di Kota

Witjaksono, D. K., & Wibawani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 414. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8330>